

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 LANDASAN FILSAFAT, TEORI, TERMINOLOGI DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA	1
A. Landasan Filsafat, Teori dan Terminologi Hak Asasi Manusia	1
B. Sejarah Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	12
BAB 2 PRINSIP DAN TEORI HAK ASASI MANUSIA	25
A. Prinsip dan Teori Hak Asasi Manusia	25
B. Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	45
C. Teori Pengurangan (<i>Derogation</i>) dan Pembatasan (<i>Limitation</i>)	50
D. Teori Kewajiban Negara dan Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia	66

BAB 3 INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA	77
A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	79
B. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	84
C. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	106
D. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	117
E. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	124
F. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat	132
G. Konvensi tentang Hak Anak	142
H. Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka	150
I. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas	163
J. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa	172
K. Mekanisme Berdasarkan Traktat (<i>Treaty Based Mechanism</i>) dan Mekanisme Berdasarkan Piagam (<i>Charter Based Mechanism</i>) Bagi Pengawasan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	178
BAB 4 INSTRUMEN REGIONAL HAK ASASI MANUSIA	191
A. Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar	191
B. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia	198
C. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat	204
D. Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia	208

BAB 5 INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	215
A. Konstitusi dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi	217
B. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia	229
C. Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia	238
D. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak	244
E. Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	249
F. Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	253
G. Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas	255

DAFTAR PUSTAKA	261
GLOSARIUM	265
INDEKS	277
BIODATA PENULIS	279